**ANALISIS KOREKSI FISKAL PAJAK PENGHASILAN
PADA PT. JAYA CIPTA PRATAMA JAKARTA**

Rieska Maharani
Universitas Muhammadiyah Surabaya
rieska.maharani@gmail.com

Abstrak : Salah satu cara untuk membantu pengambilan keputusan bisnis suatu perusahaan yang pada hakekatnya berhubungan dengan pajak adalah melakukan penyesuaian dalam penghitungan penghasilan kena pajak atau disebut dengan koreksi fiskal. Penyebab timbulnya koreksi fiskal adalah terjadinya perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos laba rugi. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Jaya Cipta Pratama. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan dan UU pajak penghasilan serta pengaruhnya pada laporan keuangan PT Jaya Cipta Pratama. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian koreksi fiskal yang dilakukan pada PT Jaya Cipta Pratama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2014 dan tahun 2015. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 untuk koreksi fiskal positif. Untuk kepala divisi bidang akuntansi, dalam memaksimalkan koreksi fiskal agar mengalami penurunan, maka dalam penyusunan pajak harus lebih teliti dan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Koreksi fiskal, undang-undang perpajakan.

Abstract : One of some ways to support every decision maker in the business of a company which related to tax is to make adjustment in calculating every income which subjected to tax which usually called as fiscal correction. Causes of fiscal correction is a gap remains between the recognition in the commercial finance accounting in determining the items in the income statement. This study was performed on the PT Jaya Cipta Pratama. The purpose of this study was to determine the application of the process of fiscal correction in the corporate income tax and its influence in the financial statement. The method used is descriptive analysis method. The result of the research tax fiscal correction performed on the PT Jaya Cipta Pratama within a period of 2 years in 2014 and in 2015. The year 2015 amount of positive tax fiscal correction is still high then in 2014 the amount of tax fiscal correction decreased quite positive. For the head of the accounting division, in order to maximize the tax fiscal correction has decreased both positive fiscal, then in the preparation of the tax must be thorough and comply with tax laws and regulation

Keywords : fiscal correction, tax laws

Pendahuluan

Latar Belakang

Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Peranan pajak sebagai sumber penerimaan dan pengatur dalam pembangunan disuatu negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Pada hakekatnya pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya.

Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi keajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Penyebab timbulnya atau terjadinya koreksi fiskal adalah terjadinya perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laba rugi, seperti pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya serta perbedaan waktu dalam pengakuan tersebut.

Faktor pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. PT. Jaya Cipta Pratama adalah sebuah perusahaan dagang yang terletak di kota Jakarta dan dalam operasioalnya, perusahaan ini menjadi salah satu supplier untuk hotel, restaurant dan supermarket di Jakarta. Aktivitas operasional dengan jangkauan tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai koreksi fiskal pada PT. Jaya Cipta Pratama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan dan UU pajak penghasilan serta pengaruhnya pada laporan keuangan PT Jaya Cipta Pratama.

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarsono (2009:3) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Suwardjono (2010:6) mengatakan akuntansi adalah kegiatan/fungsi penyediaan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomik, terutama yang bersifat keuangan, yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomik.

Di dalam SAK sendiri mengatur berbagai bagian dari akuntansi seperti laporan keuangan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklarifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Jusup (2012:27) menyebutkan laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi terdiri atas Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas.

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan dalam pengertiannya apabila utang pajak yang tidak di bayar, utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak ditunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Dapat dipaksakan

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi menurut Resmi (2014:3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regulend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Dalam Agoes (2013: 10) menyebutkan akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dan pengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah

Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU. 36 tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut Waluyo (2013:103) baha subjek pajak yang menerima maupun memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir salam tahun pajak.

Pajak penghasilan yang harus dilaksanakan wajib pajak yang berbentuk badan usaha, diantaranya PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2). Besarnya PPh yang terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak.

Rekonsiliasi fiskal menurut Agoes (2013:237) adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga mengakibatkan munculnya koreksi atau penyesuaian fiskal, baik koreksi fiskal positif, maupun koreksi fiskal negatif.

Dasar yang dapat digunakan untuk memperoleh besaran laba kena pajak (PKP) adalah dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban, cara demikian ini tidak lain adalah pembukuan. Dalam pembukuan ini informasi yang terpenting untuk menghitung PPh yang terutang yaitu penghasilan dan biaya.

Penghasilan di dalam perpajakan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan (PPh Pasal 4 ayat 1)

- b. Penghasilan, bukan Objek Pajak Penghasilan (PPH Pasal 4 ayat 3)
- c. Penghasilan Kena Pajak bersifat Final dan secara khusus (PPH Pasal 4 ayat 2)

Pengeluaran-pengeluaran perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*Deductible Expenses*) dan biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*Non Deductible Expenses*).

Penyusutan fiskal dibagi menjadi kelompok bangunan dan bukan bangunan. Kelompok bukan bangunan dibagi menjadi 4 yang memiliki masa manfaat berbeda-beda.

- a. Kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 25% dan saldo menurun 50%
- b. Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 12,5% dan saldo menurun 25%
- c. Kelompok 3 dengan masa manfaar 16 tahun dengan tarif garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%
- d. Kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun dengn tarif garis lurus 5% dan saldo menurun 10%

Koreksi fiskal dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu menurut Agoes (2013:238). Perbedaan tetap (permanen) terjadi karena adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Sedangkan perbedaan waktu (sementara) merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer, dimana secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah, sedangkan koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Setelah melakukan koreksi fiskal berdasarkan laporan keuangan

komersial, kita dapat mengetahui laporan keuangan fiskal yang berguna dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

Ryan dkk (2014) melakukan penelitian mengenai analisis terhadap koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT Bitung Mina Utama di Kota Bitung. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakn dan UU pajak penghasilan serta pengaruhnya pada laporan kengan PT Bitung Mina Utama. Hasil penelitian ini menunjukkan laporan keuangan PT Bitung Mina Utama pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal pajak positif masih tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak positif mengalami penurunan, sedangkan jumlah koreksi fiskal negatif tahun 2012 cukup tinggi dan tahun 2013 jumlah koreksi fiskal negatif mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Eko Agi (2014) melakukan penelitian mengenai analisis dan penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 UU no. 36 Tahun 2008 pada PT BPR Celebes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perhitungan dan penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 UU no 36 Tahun 2008 pada PT BPR Celebes. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pajak penghasilan pasal 25 tahun 2012 dan 2013 setelah terlebih dahulu mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang pasal 29 tahun 2012 dan 2013. Pajak penghasilan terutang diperoleh setelah dilakukan perhitungan dan koreksi fiskal atas laporan laba-rugi tahun 2012 dan 2013 dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan koreksi fiskal terlihat perbedaan pajak penghasilan pasal 25 dengan sebelum dilakukan koreksi fiskal.

Metodologi Penelitian

Sugiyono (2010:21) menjelaskan jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi (*level of explanation*) dan waktu. Dari segi metode penelitian dapat dibedakan menjadi : penelitian survey, *expostfacto*, eksperimen, naturalistik, *policy research*, *evaluation research*, *action research*, sejarah, dan *research and development* (R&D). Yang termasuk dalam metode kuantitatif adalah metode penelitian eksperimen dan survey, sedangkan yang termasuk dalam metode kualitatif adalah metode naturalistik

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian tercapai.

Langkah-kangkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada PT Jaya Cipta Pratama sebagai berikut:

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah
2. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat
3. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di PT Jaya Cipta Pratama untuk mengetahui bagaimana koreksi fiskal pajak penghasilan berpengaruh terhadap laporan keuangan lebih khusus pada laporan laba-rugi.
4. Mengolah dan mengintepretasikan hasil pengolahan data
5. Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan
6. Pemberian saran

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan kepada pimpinan atau pegawai-pegawai terkait dengan penelitian yang dilakukan dalam hal ini pimpinan dan pegawai bagian akuntansi yang ada di PT Jaya Cipta Pratama untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba-rugi.

2. Dokumentasi metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi data laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi untuk mengetahui penerapatan koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT Jaya Cipta Pratama dan pengaruhnya pada laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi.

Metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif, yaitu mengiktisarkan dan menguraikan karakteristik kegiatan usaha dan laporan keuangan.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Akun-akun Koreksi Fiskal Positif

Klasifikasi terhadap beberapa akun laba rugi yang merupakan akun koreksi fiskal positif dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Akun Koreksi Fiskal Positif Tahun 2014 dan 2015

No	Nama Akun	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Uang Makan	2.542.850	1.354.950
2.	Biaya Pengobatan	591.750	530.750
3.	Biaya Telepon dan fax	1.512.200	1.537.000
4.	Sumbangan	489.000	768.000
5.	Biaya Representasi	-	325.000
6.	Biaya lain-lain kantor	15.193.25	23.190.700
Jumlah (Rp)		20.328.850	27.706.400

Sumber: Laporan Laba Rugi PT Jaya Cipta Pratama Tahun 2014 dan 2015

Akun-akun Koreksi Fiskal Negatif

Klasifikasi terhadap beberapa akun laba rugi yang merupakan akun koreksi fiskal negatif dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Akun Koreksi Negatif Tahun 2014 dan 2015

No	Nama Akun	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Biaya Penyusutan	6.296.031	7.358.869
2.	Pendapatan lain-lain	7.944.210	3.523.823
Jumlah (Rp)		14.240.241	10.882.692

Sumber: Laporan Laba Rugi PT Jaya Cipta Pratama Tahun 2014 dan 2015

Pembahasan

Penerapan Koreksi Fiskal Positif

1. Uang Makan

Pada laporan laba-rugi perusahaan PT Jaya Cipta Pratama tahun 2014 dan 2015 terdapat uang makan yang dikoreksi positif. Berdasarkan PMK-83/PMK.03/2009, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Dalam laporan laba-rugi perusahaan, uang makan tersebut hanya diberikan kepada beberapa pegawai bukan semua pegawai.

2. Biaya Pengobatan

Pada laporan laba-rugi perusahaan tahun 2014 dan 2015 terdapat biaya pengobatan yang dikoreksi positif, merupakan biaya penggantian pengobatan, maka tidak dapat dibebankan kepada perusahaan (pasal 9 ayat (1) huruf (d))

3. Biaya Telepon dan Fax

Pada laporan laba-rugi perusahaan terdapat biaya telepon baik dalam laporan keuangan tahun 2014 ataupun 2015 yang sesuai dengan keputusan direktorat jendral pajak No.Kep-

220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (Direktorat Jendral Pajak, 2002)

4. Sumbangan

Sumbangan yang ada di dalam laporan laba-rugi perusahaan sesuai dengan undang-undang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf (g), harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

5. Biaya Representasi/Jamuan

Biaya representasi jamuan yang ada di dalam laporan laba-rugi perusahaan tidak ada daftar nominatif. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha WP atau yang tidak dibuatkan daftar nominatif untuk dilampirkan pada SPT Tahunan PPh (SE-27/PJ22/1986)

6. Biaya Lain-lain Kantor

Biaya lain-lain di dalam laporan laba rugi perusahaan tidak berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, maka perlu dilakukan koreksi fiskal (UU PPh Pasal 6 ayat (1))

Penerapan Koreksi Fiskal Negatif

1. Biaya Penyusutan

Pada laporan laba rugi perusahaan tahun 2014 dan 2015, penyusutan disajikan tidak sesuai dengan Pasal 11 UU PPh, dimana perusahaan menggunakan masa manfaat 5 tahun untuk kelompok 1 dan 10 tahun untuk kelompok 2, sedangkan menurut fiskal kelompok 1 memiliki umur manfaat 4 tahun dan kelompok 2

umur manfaat 8 tahun, sehingga ada selisih antara laporan keuangan perusahaan dengan fiskal.

2. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain perusahaan PT Jaya Cipta Pratama hanya terdapat pendapatan jasa giro yang merupakan pendapatan yang kena pajak final sehingga dikeluarkan dari pendapatan lain-lain sebagai penambah laba. Sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (2) huruf (a), bahwa penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

Analisis Koreksi Fiskal pada PT Jaya Cipta Pratama.

Setiap perusahaan tiap tahun melaporkan pajak terutangnya masing-masing dan besarnya pajak perusahaan itu dapat dilihat di laporan keuangan perusahaan. Sering kali dalam penyajian laporan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak sering kali terdapat kesalahan pencatatan khususnya di dalam laporan laba rugi, itu disebabkan karena perusahaan tidak melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga menimbulkan kesalahan pencatatan.

Kesalahan di dalam pencatatan terjadi karena perbedaan tetap antara pengakuan di dalam laporan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak (sesuai dengan peraturan perpajakan) dan terjadi perbedaan temporer (beda waktu) antara jangka waktu saat pengakuan dalam akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, maka diperlukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal sendiri terbagi menjadi 2 yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang mengakibatkan peningkatan laba kena pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif mengakibatkan penurunan laba kena pajak. PT Jaya Cipta Pratama di dalam laporan laba rugi tahun 2014 dan 2015 sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada terjadi kesalahan pencatatan antara pengakuan akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak sehingga dilakukan koreksi positif dan negatif. Hasil penelitian

Penutup

Kesimpulan

Penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT Jaya Cipta Pratama dalam kurun waktu 2 tahun sudah terlaksana dengan cukup baik meskipun beberapa akun yang dikoreksi fiskal positif dan negatif yaitu biaya uang makan, biaya pengobatan, biaya telepon dan fax, sumbangan, biaya representasi, serta biaya lain-lain dikoreksi fiskal positif sedangkan akun-akun yang dikoreksi fiskal negatif yaitu penyusutan dan pendapatan jasa giro.

Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Manajemen perusahaan khususnya divisi akuntansi harus lebih teliti lagi dalam menghitung pajak penghasilan agar tidak terjadi banyak koreksi fiskal, baik koreksi fiskal positif maupun negatif. Hendaknya perusahaan dalam menghitung PPh sesuai dengan UU PPh serta UU Direktorat Jendral Pajak, karena akan berpengaruh pada tingkat laba.
2. Perlunya informasi yang tepat dan jelas bagi manajemen perusahaan tentang biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan bruto.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B dan Diaz Priantara, 2014, *Akuntansi Perpajakan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Jusuf, Al Haryono, 2012, *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1*, YKPN, Yogyakarta.
- Koraag, Eko Agi, 2014, *Analisis dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 pada PT. BPR Celebes*.
- Languju, Ryan CC, dkk, 2014, *Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT Bitung Mina Utama di Kota Bitung*.
- Lesmana, Eko J, 2015, *Undang-undang Pajak Tahun 2015*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia Buku 1*, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.